

Corporate Social Responsibility PT Newmont Nusa Tenggara Dalam Mengakomodasi Kepentingan Pemerintah dan Masyarakat

Hari Akbar Sugiantoro

Prodi Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, Dan Humiora
Universitas `Aisyiyah Yogyakarta
Email : hariakbarsugianto@gmail.com

Abstract

Trends in companies today not only learn crisis management and corporate social responsibility strategy, but more macro, which maintain the integrity between business, government, and society. The concept of Business, Government, and Society states that between business people (companies), government, and society should be a good relationship. One of the means that can be used to achieve a good relationship between these elements is the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR). In the concept of Business, Government, and Society (BGS), ideally representing the concept of CSR is able to integrate elements of BGS in business, government, and society. In the implementation in the field, it is assumed that a company's CSR organized by considering the business interests or the interests of the company itself, the interests of the government, especially local government in which the company operates, and environmental interests of communities around the company's operations. In this study, PT Newmont Nusa Tenggara CSR into the core of the object of study, the research will focus related accommodation between business interests are represented by PT NNT, the government in western Sumbawa represent local governments, as well as the society represented by the community around the mine. This study describes whether and how the interests of each element are met in the CSR program.

Keywords: Accommodation interests, integration, CSR

Intisari

Tren perusahaan saat ini tidak hanya mempelajari manajemen krisis serta strategi tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi lebih makro, yaitu menjaga integritas antara *business, government, and society*. Konsep *Business, Government, and Society* menyatakan bahwa antara pelaku bisnis (perusahaan), pemerintah, dan masyarakat harus ada hubungan yang baik. Salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai hubungan baik antara ketiga elemen tersebut adalah pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam konsep *Business, Government, and Society* (BGS), idealnya CSR mampu mewakili konsep BGS dalam mengintegrasikan unsur bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya di lapangan, diasumsikan bahwa suatu perusahaan menyelenggarakan CSR dengan

mempertimbangkan kepentingan bisnis atau kepentingan perusahaan itu sendiri, kepentingan pemerintah terutama pemerintah daerah dimana perusahaan beroperasi, dan kepentingan masyarakat di sekitar lingkungan operasional perusahaan. Dalam penelitian ini, CSR PT Newmont Nusa Tenggara menjadi inti dari objek penelitian, penelitian akan menitik beratkan terkait akomodasi kepentingan antara *business* yang di wakili oleh PT NNT, *government* yang di wakili pemerintah daerah Sumbawa barat, serta *society* yang di wakili oleh masyarakat lingkaran tambang. Penelitian ini menggambarkan apakah dan bagaimana kepentingan-kepentingan dari setiap unsur terpenuhi di dalam program CSR.

Kata kunci : Akomodasi kepentingan, integrasi, CSR

A. Pendahuluan

Dinamika perubahan situasi politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia menyebabkan beberapa perusahaan asing yang dulunya lancar beroperasi di Indonesia karena didukung oleh pemerintah dan aparat keamanan di Indonesia, menjadi terbatas gerakannya. Perusahaan-perusahaan seperti PTNNT harus lebih memperhatikan faktor masyarakat dalam operasional perusahaan. Saat ini, perusahaan-perusahaan pertambangan diharuskan tidak hanya mendapatkan ijin pertambangan dari pemerintah atau *license to formal*, melainkan juga dari masyarakat sekitar yang akan terkena dampak operasional perusahaan atau *license to social*. Apabila kepentingan masyarakat tidak diperhatikan, maka benturan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah tidak dapat dihindarkan. Masyarakat memang seringkali berada pada posisi korban, akan tetapi kekuatan atau *powersociety* saat ini cukup besar untuk dapat menghambat atau bahkan menghentikan operasional perusahaan.

Kerusuhan dan kontroversi antara masyarakat dengan perusahaan tambang dan pemerintah juga dialami oleh PTNNT. Sepanjang operasionalnya selama 10 tahun, ditemui beberapa kasus yang mencuat ke depan publik, antara lain: pencemaran teluk Benete, kesejahteraan masyarakat, dan kontroversi terkait divestasi saham. Kasus yang terakhir merupakan kasus terbaru yang dialami PTNNT, dimana ada ketentuan bahwa 50% atau setengah dari kepemilikan saham harus dipegang oleh pemerintah.

George Steiner dan John Steiner menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa manajemen perusahaan perlu mempelajari konsep *Business, Government, and Society*. Salah satu alasannya adalah bahwa dalam menjalankan industrinya, perusahaan tidak hanya terlibat dengan lingkungan bisnis, melainkan juga lingkungan nonbisnis, yaitu masyarakat, pemerintah, dan para *stakeholder*. Perjanjian dasar yang tertuang dalam kontrak sosial antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat harus dihormati dan dipatuhi, termasuk adanya ekspektasi yang berlebih dari masyarakat ketika sebuah perusahaan didirikan (Steiner, 2004 : 5)

Tren perusahaan saat ini tidak hanya mempelajari manajemen krisis serta strategi tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi lebih makro, yaitu menjaga integritas antara *business, government, dan society*. (Mccombs.utexas.edu, 2017).

Konsep *Business, Government, and Society* menyatakan bahwa antara pelaku bisnis (perusahaan), pemerintah, dan masyarakat harus ada hubungan yang baik. Salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai hubungan baik antara ketiga elemen tersebut adalah pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

PT. Newmont Nusa Tenggara melaksanakan program CSR dalam empat bidang utama, yaitu peningkatan pendidikan, kesehatan, peningkatan perekonomian masyarakat/pertanian, dan pengembangan infrastruktur. Wilayah pelaksanaan CSR adalah daerah lingkaran tambang, KSB, dan proyek khusus di Sumbawa. Pelaksana CSR yang diselenggarakan oleh PTNNT adalah Seksi Comdev, Yayasan Olat Parigi (YOP) dengan fokus pada *micro-finance* dan *revolving fund*, Yayasan Pengembangan Ekonomi Sumbawa Barat (YPESB) dengan fokus pada pengembangan industri kecil dan pendampingan pengusaha lokal, serta 190 tenaga karyawan dan mitra kerja PTNNT. Anggaran yang disiapkan selama satu tahun khusus untuk program CSR adalah sekitar lima puluh milyar rupiah. Terkait dengan gambaran besar CSR yang diselenggarakan oleh PTNNT, muncul pertanyaan, apakah empat bidang pelaksanaan CSR tersebut telah mewadahi kepentingan bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Secara lebih mendetail.

Latar belakang yang telah disampaikan di atas mengarahkan peneliti pada rumusan masalah penelitian berikut: “Sejauh mana PT Newmont Nusa Tenggara mengakomodasi kepentingan *Government and society* dalam program CSR. Penelitian ini akan membahas bagaimana manajemen perusahaan, sebagai pihak *business* dalam kerangka BGS, memperhatikan dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan unsur *government* dan *society*, sebagai *stakeholder*, dalam penyelenggaraan program-program CSR serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akomodasi kepentingan *Business, Government, and Society* pada program *Corporate Social Responsibility* PT Newmont Nusa Tenggara

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan tiga kelompok teori, yaitu mengenai kebijakan *Business, Government, and Society* (BGS), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan *stakeholders perspective*. Penelitian ini berawal dari eksistensi konsep *Business, Government, and Society* (BGS), yang menyatakan pentingnya interaksi antara tiga pilar besar yang memiliki peran signifikan dalam dunia bisnis, yaitu perusahaan (*business*), pemerintah (*government*), dan masyarakat (*society*).

Dalam kerangka makro BGS, dikemukakan konsep yang lebih mikro, yang mampu mewakili interaksi antara tiga pilar yang diusung BGS, yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). Secara sederhana, CSR dapat diterjemahkan sebagai aktivitas nonoperasional perusahaan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sosialnya, bukan hanya terhadap *shareholder*, melainkan juga *stakeholder*, yang keberadaannya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan.

1. Business, Government, and Society (BGS)

Business, Government, and Society (BGS) adalah konsep yang mempelajari interaksi antara unsur bisnis, pemerintah, dan masyarakat, yang secara khusus

menetapkan perhatiannya pada interaksi antara unsur bisnis dengan pemerintah dan antara unsur bisnis dengan masyarakat. Fokus utama konsep BGS adalah bagaimana unsur bisnis membentuk dan mengubah unsur pemerintah dan masyarakat; dan bagaimana unsur bisnis dibentuk oleh tekanan politik dan sosial.(Steiner, 2004 : 6)

Hubungan BGS dapat diwujudkan melalui berbagai alternatif model, meliputi *market capitalism model*, *dominance model*, *countervailing forces model*, dan *stakeholder model*. Setiap model dapat dipandang sebagai penjelasan mengenai bagaimana hubungan BGS terwujud atau sebagai patokan ideal tentang bagaimana seharusnya hubungan BGS terwujud

Model market capitalism mendeskripsikan bisnis sebagai entitas yang terlindungi dari persinggungan secara langsung dengan dorongan sosiopolitis dan hanya fokus pada dorongan ekonomis. Perspektif kapitalisme pasar memiliki efek berikut terhadap hubungan BGS: peraturan pemerintah harus dibatasi, sektor swasta difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kinerja perusahaan dilihat dari pencapaian keuntungan, dan tugas etis manajemen adalah untuk memenuhi kepentingan *shareholder*.

Dominance model adalah model hubungan BGS yang bertolakbelakang dengan demokrasi, dimana pihak bisnis (*business*) dan pemerintah (*government*) berada pada posisi yang lebih dominan dibandingkan masyarakat (*society*). Menurut *dominance model*, terdapat sekelompok kecil orang yang mengelola sebuah sistem yang dapat meningkatkan dan melestarikan kesejahteraan dan kuasa golongan tertentu meskipun dengan mengorbankan yang lain. Model ini memberikan bentuk ideal BGS secara kontradiktif. Artinya, hubungan BGS dapat diklasifikasikan baik apabila memuat semua ciri yang bertentangan dengan *dominance model*.

Countervailing forces model menggambarkan hubungan BGS sebagai interaksi bolak-balik antar unsur-unsur utama dalam masyarakat. Dalam model ini, bisnis diintegrasikan secara mendalam di masyarakat luas, dimana bisnis harus responsif terhadap dorongan ekonomi maupun nonekonomi. *Countervailing forces model* menyatakan bahwa bisnis, bekerjasama dengan pemerintah, merupakan pelopor perubahan terbesar di tengah masyarakat.

Stakeholder model menempatkan perusahaan sebagai pusat dari sekumpulan hubungan mutualisme dengan individu-individu atau kelompok-kelompok yang disebut sebagai *stakeholders*. Menurut model ini, kesejahteraan masing-masing *stakeholder* perusahaan harus terpenuhi. *Stakeholder model* menuntut adanya penghargaan atas kepentingan *stakeholder*. *Stakeholder* didefinisikan melalui kepentingan mereka dalam perusahaan, dan bukan kepentingan perusahaan pada mereka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *stakeholder model* sebagai cara untuk memandang hubungan BGS dalam perusahaan yang menjadi lokasi penelitian. Model ini akan dibahas lebih lanjut dalam penjelasan mengenai *stakeholders*.

2. Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia

CSR dapat didefinisikan sebagai kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*)

dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* merupakan kepedulian perusahaan yang didasari oleh tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines*, sebagai berikut(Wibisono, 2007)

a. Profit

b. People (Masyarakat)

c. Planet (Lingkungan)

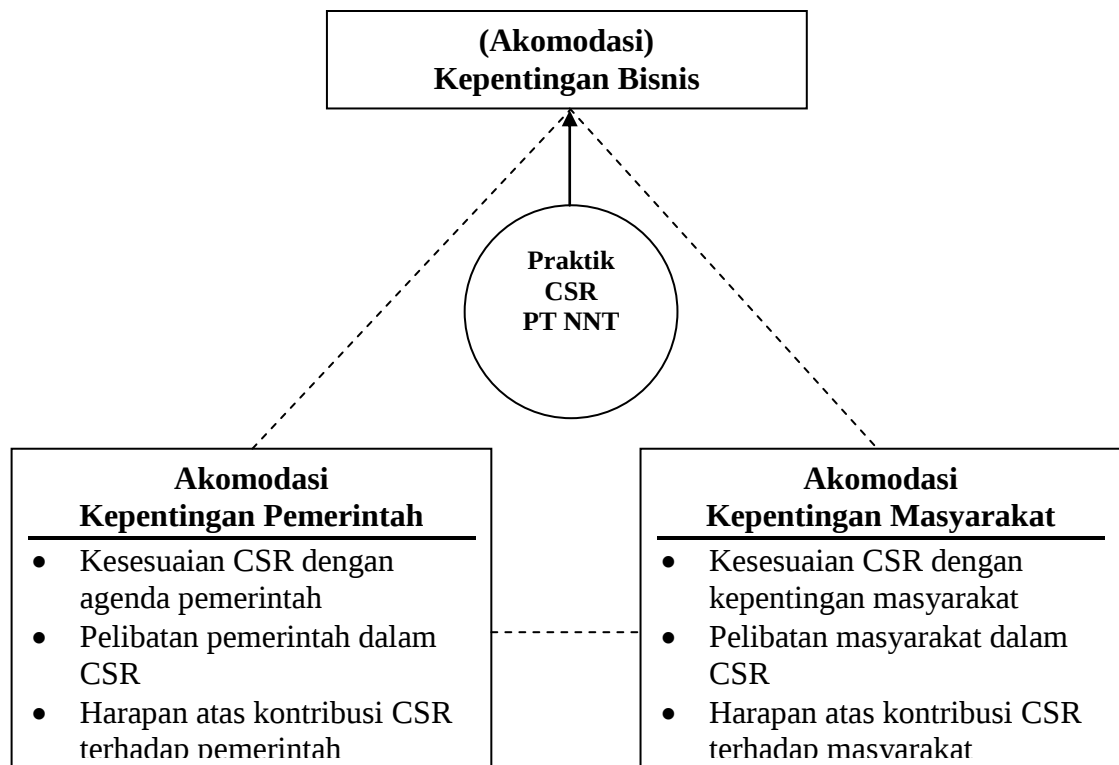
Penyelenggaraan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terbagi menjadi empat tahap, yaitu perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pelaporan. Program CSR dapat dikatakan berhasil dengan baik apabila mampu merepresentasikan sebagian atau keseluruhan kepentingan masing-masing unsur dalam BGS dalam tiap tahapan tersebut, yaitu perusahaan (*business*), pemerintah (*government*), dan masyarakat (*society*). Kepentingan yang dimaksud di sini adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

3. Perspektif Stakeholder

Istilah *stakeholder* secara luas didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi tindakan perusahaan(Gray, Owen, & Afams, 1996 : 45). *Stakeholder* dapat dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, dan praktik bisnis perusahaan, dan sebaliknya, *stakeholder* dapat mempengaruhi segala tindakan, keputusan, kebijakan, dan praktik bisnis perusahaan (Carrol & Buchholtz, 2006). Segala bentuk tindakan perusahaan dapat memicu lahirnya hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*, dimana pencapaian tujuan perusahaan menjadi dasar dari hubungan antara sebuah perusahaan dengan *stakeholder*-nya (Freeman, 1984)

Berdasarkan ruang lingkup hubungannya dengan perusahaan, *stakeholder* dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu *market stakeholder* dan *nonmarket stakeholder*.

Gambar 1: Model Penelitian



C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Poerwandari (2001) mengatakan, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan khusus atas suatu fenomena serta untuk dapat memahami manusia dalam segala kompleksitasnya sebagai makhluk subjektif, pendekatan kualitatif merupakan metode yang paling sesuai untuk digunakan. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengungkap penelitian ini adalah Observasi dan wawancara mendalam. Analisis data dalam metode studi kasus ini bergantung pada pemikiran logis dan imajinasi dari peneliti (Suryabrata, 1992).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Standarisasi CSR di PT NNT

Peneliti menggali data mengenai program *corporate social responsibility* (CSR) melalui wawancara dengan Ahmad Salim, yang menjabat sebagai *Supervisor Government Relations* di PT NNT. Beliau menyatakan bahwa program CSR yang dilakukan oleh PT NNT merupakan bagian dari strategi *marketing* perusahaan, dan bukan hanya diposisikan sebagai kegiatan *charity* – sebagaimana telah menjadi *mindset* di daerah kabupaten Sumbawa Barat. PT NNT merencanakan program CSR yang menuntut adanya partisipasi aktif dari warga desa di daerah lingkaran tambang yang termasuk dalam AMDAL (analisis dampak lingkungan) atau terkena dampak langsung dari operasional perusahaan. Perusahaan berusaha mencanangkan program

CSR yang terintegrasi dengan kebutuhan *stakeholder* atau kelompok pemangku kepentingan, dimana target utamanya adalah masyarakat, dengan tetap memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Terkait dengan landasan pelaksanaan CSR, Kasan Mulyono sebagai senior eksternal relations menyatakan bahwa konsep CSR yang digunakan oleh PT NNT secara sempit, yaitu *community development*, mengacu pada ISO 14001, terutama pada standar-standar yang mengatur aspek sosial, misalnya standar tentang investasi masyarakat lokal. Sedangkan secara luas, yang digunakan sebagai acuan adalah ISO 26000, best practice CSR di Indonesia dan dunia, serta kreativitas PT NNT sendiri. Beliau berpendapat bahwa program CSR yang mengacu pada standar umum yang universal dan global (di antaranya adalah ISO 14001 dan ISO 26000) adalah CSR ideal. Selain itu, CSR yang ideal juga harus sesuai dengan hasil analisis dan kajian-kajian atas *stakeholder*, *need analysis*, *impact analysis*, dan sebagainya. Digunakannya landasan teoretikal tidak cukup untuk mencirikan CSR yang ideal. Untuk menciptakan CSR yang ideal, harus ada konsultasi dengan para pemangku kepentingan utama, serta ada pemantauan dan evaluasi secara partisipatif dari para pemangku kepentingan tersebut.

2. CSR Sebagai Akomodasi Kepentingan Pemerintah dan Masyarakat

Secara internal kelembagaan, dalam melaksanakan program *corporate social responsibility* (CSR), PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) berpedoman pada Renstra Program *Comdev*. Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan, pengawasan/*monitoring*, dan evaluasi program CSR dalam jangka waktu lima tahun. Proses penyusunan Renstra terbagi ke dalam empat tahap, seperti yang dijelaskan sebagai berikut.

Tahap 1 Kegiatan perencanaan program tingkat desa, menggunakan metode *participatory rural appraisal* (PRA), yang dilakukan di tiga belas desa dalam tiga kecamatan. Hasilnya berbentuk Dokumen Perencanaan Desa.

Tahap 2 Kegiatan penyusunan rancangan (*draft*) Renstra berdasarkan hasil PRA, yang kemudian dipadupadankan dengan Renstra program *Comdev* tahun Hasil penggabungannya terangkum dalam sebuah kerangka kegiatan yang menggambarkan alur program selama lima tahun, mulai dari sasaran, tujuan, dan rancangan pelaksanaan kegiatan. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen *draft* Renstra

Tahap 3 Kegiatan konsultasi publik, yang melibatkan perwakilan dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Hasilnya adalah penyempurnaan *draft* Renstra berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Tahap 4 Kegiatan finalisasi Renstra, dimana Renstra disempurnakan dengan menetapkan indikator jangka pendek dan jangka panjang bagi setiap kegiatan. Hasilnya berupa dokumen Renstra sebagai panduan pelaksanaan *Comdev* dalam jangka waktu lima tahun tersebut

3. Kesesuaian dan Pelibatan Agenda Pemerintah dengan CSR

Peneliti melakukan wawancara terhadap Abdul Aziz selaku wakil Sekretaris Daerah kabupaten Sumbawa Barat. Menurut Abdul Aziz, hubungan pemerintah kabupaten Sumbawa Barat dengan PT Newmont Nusa Tenggara dapat dikatakan baik, meskipun mengalami pasang surut beberapa kali. Keberadaan PT NNT hingga saat ini dipandang memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan daerah. Beliau menyebutkan kecamatan Maluk sebagai salah satu contoh, dimana terlihat adanya penambahan gedung sekolah dibandingkan dengan masa pra kehadiran PT NNT. Program CSR yang dilakukan oleh PT NNT diakui keterlaksanaannya dalam pilar pendidikan, kesehatan, perekonomian atau pembangunan, lingkungan, dan sosial keagamaan.

Sehubungan dengan manfaat yang diterima oleh pemerintah kabupaten Sumbawa Barat melalui program CSR oleh PT NNT, Abdul Aziz menggolongkannya dalam dua bidang utama, yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia. Dalam bidang infrastruktur, PT NNT membangun berbagai properti untuk pemerintah dan masyarakat, antara lain: pasar, gedung serbaguna, jalan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Dari segi sumber daya manusia, PT NNT mengembangkan tenaga-tenaga ahli yang bekerja di perusahaan dan memegang jabatan yang signifikan dalam perusahaan, sehingga kualitas sumber daya manusia di kabupaten Sumbawa Barat dapat bersaing dengan sumber daya manusia di daerah lain di Indonesia.

Dalam mensinergikan kepentingan pemerintah dengan agenda PT NNT, beliau menyatakan bahwa pemerintah dilibatkan dalam beberapa kegiatan PT NNT. Salah satunya adalah diskusi mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh PT NNT. Selain itu, pemerintah daerah juga diundang dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra), bersama dengan perwakilan masyarakat lingkaran tambang. Kebijakan PT NNT yang bertentangan dengan misi pemerintah daerah akan dikritisi, misalnya dengan demonstrasi untuk menolak kebijakan tersebut.

4. Pelibatan Masyarakat dalam CSR PT NNT

Kepentingan kolektif masyarakat kecamatan Sekongkang, Jereweh, dan Maluk, yang terangkum dalam Dokumen Perencanaan Desa merupakan bagian dari proses penyusunan Renstra Comdev PT NNT tahap 1, yaitu kegiatan perencanaan program tingkat desa. Dengan demikian, program CSR PT NNT menunjukkan kesesuaian dengan kepentingan masyarakat lingkaran tambang.

5. Pelibatan Masyarakat dalam CSR PT NNT

Dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2014, ditemukan keterlibatan masyarakat dalam CSR PT NNT pada aspek-aspek berikut.

- a. Penyusunan Renstra Comdev 2011 – 2014 tahap perencanaan program tingkat desa, yang menggunakan metode participatory rural appraisal (PRA) dengan hasil berupa Dokumen Perencanaan Desa.
- b. Penyusunan Renstra Comdev 2011 – 2014 tahap konsultasi publik, yang melibatkan perwakilan dari pemerintah desa dan masyarakat umum.
- c. Masyarakat lingkaran tambang direkrut sebagai kader tenaga kesehatan.
- d. Masyarakat lingkaran tambang dilibatkan dalam kegiatan gotong royong dan pengelolaan sampah dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat.

- e. Masyarakat lingkaran tambang dilibatkan sebagai peserta penyuluhan kesehatan, pelatihan pendidikan, pelatihan manajemen usaha, pelatihan pertanian, dan pelatihan ketrampilan nelayan (budidaya tambak, penangkapan tuna, dan sebagainya).
- f. Masyarakat lingkaran tambang mendapatkan kesempatan untuk bekerja di PT NNT dan dalam usaha produktif baru yang didirikan oleh PT NNT.
- g. Masyarakat lingkaran tambang dilibatkan dalam pemeliharaan infrastruktur yang dibangun oleh PT NNT dalam program CSR 2011 – 2014.

E. Kesimpulan

Dari temuan dan analisis peneliti dapat menyimpulkan bahwa Program *corporate social responsibility* PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2011 – 2014 telah mengakomodasi kepentingan pemerintah kabupaten Sumbawa Barat dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Program *corporate social responsibility* PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2011 – 2014 telah mengakomodasi kepentingan pemerintah kabupaten Sumbawa Barat dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Program *corporate social responsibility* PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2011 – 2014 telah mengakomodasi secara utuh kepentingan masyarakat lingkaran tambang di kecamatan Sekongkang, Jereweh, dan Maluk dalam sektor kesehatan, pendidikan, usaha ekonomi masyarakat, pertanian, kelautan, dan pariwisata, serta sosial budaya dan agama.

PT Newmont Nusa Tenggara menggunakan model *corporate social responsibility* antara *stakeholder model* dan *social demandingness model*. Kombinasi model tersebut memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan yang terkait dengan interaksi perusahaan dengan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

PT Newmont Nusa Tenggara melaksanakan program *corporate social responsibility* dengan mengacu pada ISO 26000 dengan dorongan internal atau secara sukarela. Namun walau sudah secara keseluruhan mengakomodasi kepentingan yang ada, tetapi khusus hubungan terkait masyarakat masih ada persepsi negatif terkait program yang diberikan oleh PT NNT.

Corporate social responsibility merupakan salah satu wadah untuk mengakomodasi kepentingan tiga unsur penting dalam dunia manajemen bisnis, yaitu *business*, *government*, dan *society*. BGS, sebagai landasan dari penelitian ini, memberikan empat model hubungan antara unsur *business-government-society*, dimana yang ditemukan dalam penelitian ini adalah *stakeholder model*.

Dalam model tersebut, perusahaan merupakan pusat dari sekumpulan hubungan mutualisme dengan kelompok atau individu yang menjadi *stakeholder*. *Stakeholder* adalah kelompok atau individu yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi aktivitas perusahaan. PT NNT – sebagai unsur *business* – harus memenuhi kesejahteraan masing-masing *stakeholder*. Kelompok atau individu yang termasuk *stakeholder* PT NNT adalah:

- *Market stakeholder*: karyawan PT NNT, konsumen, supplier, pemegang saham, dan sebagainya.
- *Nonmarket stakeholder*: masyarakat lingkaran tambang, pemerintah desa, pemerintah kabupaten Sumbawa Barat, pemerintah Nusa Tenggara Barat, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah (Disperindag, Bappeda, Diknas), dan lain-lain.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Carroll, A. dan Buchholtz, A. 2006. *Business and Society: Ethics and Stakeholder Management*. Mason: Thompson Learning.
- Freeman, R.E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Gray, R.H., Owen, D., dan Afams, C. 1996. *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. Hemel Hempstead: Prentice-Hall.
- Lawrence, A.T. dan Weber, J. 2011. *Business and Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Poerwandari, K. (2001). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3).
- Steiner, George dan Steiner, John. 2004. *Business, Government, and Society: A Managerial Perspective*. Singapore: McGraw-Hill.
- Suryabrata, S. (1992). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: University Gadjah Mada Press.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publish

Sumber Internet

Business Journal, March/April 2006. Diakses dari <http://iveybusinessjournal/>.
<http://www.mcombs.utexas.edu/departments/bgs>